

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal sebagai variabel inter vening kabupaten timor tengah selatan tahun anggaran 2018-2020 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut:

Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal sebagai variabel intervening TengahTahun Anggaran 2018-2020 Hal ini ditunjukkan dengan bahwa dana perimbangan perkapita pada tahun 2018-2020 kabupaten timor tengah selatan mengalami deflasi yang signifikan dimana pada tahun 2018 berjumlah Rp 1,085,750,908 sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 997,129,800

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadapbelanja modal variabel intervening Tahun Anggaran 2018-2020 Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi,nilai koefisien korelasi yaitu pada tahun 2018 tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan

dimana patahun 2018 realisasi penerimaan PAD berjumlah Rp 9,236,249,761 hingga tahun 2020 berjumlah Rp 10,778,600,784

Dana peribangan ,Pendapatan asli daerah (PAD)secara bersama-sama berpengaruh positifterhadap belanja modal kabupaten timor tengah selatan TahunAnggaran2018-2020.Halinitunjukkanpersamaanbahwa pendapat tidak merta karena dana peribagan yang mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu Rp 977,129,800 sedankan pendapatan asli daerah meningkat di tahun 2020 yaitu 10,778,600,784

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intense fikasi yaitu dengan pembinaan,dane kstensifikasi yaitu dengan penggalian potensi, karena Pendapatan Asli Daerah adalah penentu kemandirian daerah.Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi JawaTengah lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehinggaaset tetap setiap tahun meningkat, sehingga

dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Meninjau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk provinsi-provinsi lain mengingat ada 33 provinsi di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio lain selain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diantaranya adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*). Meninjau variabel-variabel independen lainnya selain yang digunakan yaitu Pajak Daerah, *Real Estate*, *Capital Grant*, dan PDRB ataupun faktor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan mikro ekonomi agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.